



Terima Pertanggungjawaban RAPBD Ketapang

KETAPANG—Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ketapang pada Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014, Selasa (4/8). Pendapat akhir tersebut dituangkan dalam Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Ketapang tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2014 di Gedung DPRD Kabupaten Ketapang.

Pimpinan DPRD menandatangani keputusan DPRD tersebut dengan Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pemberian Persetujuan kepada Bupati Ketapang untuk Menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Ketapang Tahun 2014 Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang. Persetujuan tersebut ditandatangani Bupati Ketapang Drs Henrikus MSI, Ketua DPRD Ketapang Budi Matheus SPd MSI dan para wakil-wakil Ketua DPRD Ketapang seperti Junaidi SP, Jamhuri Amir SH, serta Qadarini SE, usai mendengarkan penyampaian tujuh fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ketapang Tahun 2014.

Ketujuh fraksi yang memberikan penyampaian pendapat akhir fraksi menyatakan menerima dan menyetujui, antara lain Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang disampaikan oleh Antoni Salim, kemudian Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) oleh Gusmani SE, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) oleh Usman Diyanto, Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) melalui juru bicara H Mathari, Fraksi Partai Demokrat oleh Yangkim SPd, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) oleh Abdul Sani SH, serta Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) oleh Paulus Tan.



ISTIMEWA

PENYERAHAN NASKAH: Pelaksanatugas Sekretaris Daerah Drs H Mansyur, menerima penyerahan naskah persetujuan DPRD dari Ketua DPRD Budi Matheus SPd MSI, usai Sidang Paripurna DPRD di Gedung DPRD Ketapang, kemarin (4/8).

Selain itu ketujuh fraksi tersebut memberikan apresiasi kepada Bupati Ketapang dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban, di mana telah berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) setelah dilakukan audit oleh BPK RI di tahun 2014.

"Fraksi PDIP Perjuangan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bupati terhadap usaha yang terus menerus untuk memperbaiki kinerja keuangan pembangunan dan pemerintahan di Kabupaten Ketapang," ucap Antoni Salim dalam penyampaian pandangan akhir fraksi mereka.

Terkait pemekaran wilayah, peningkatan perekonomian pendidikan, peningkatan SDM pemerintah, kesehatan, serta infrastruktur, menurut Antoni, juga mengalami peningkatan yang membanggakan. Tetapi, dia menambahkan, secara kualitatif masih sangat mengecewakan.

Karena, dia beralasan jika proses pengerjaan proyek jalan, jembatan, dan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan cenderung asal jadi, sehingga terkesan mengesampingkan asas manfaat dari proyek tersebut

Sementara itu, Fraksi Partai Golkar melalui juru bicara mereka, Gusmani, berharap agar di masa mendatang, mampu memberikan perubahan yang cukup mendasar pada kedudukan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Kemudian, dia menambahkan, adanya kesetaraan dan kemitraan hubungan antara kepala daerah, yang menjalankan fungsi eksekutif dan DPRD yang menjalankan fungsi legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Komposisi dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ketapang tahun 2014 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang, yang sebelumnya dibacakan oleh sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Ketapang, Gusti Fadlin SSo, disebutkan bahwa devisit anggaran mencapai Rp30.872.670.258,59, pembiayaan daerah terdiri penerimaan pembiayaan sebesar Rp184.127.419.067,52, pengeluaran pembiayaan (Rp6 miliar), pembiayaan netto (Rp178.127.419.067,52), dan silpa berjalan, Rp147.254.748.808,93. (afi/ser)